

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Signal Theory*

Brigham & Houston (2014) menjelaskan dalam bukunya bahwa teori sinyal mengacu pada bagaimana pemegang saham melihat potensi peningkatan nilai perusahaan di masa depan. Informasi yang diberikan oleh pihak manajemen kepada pemegang saham dianggap sebagai sinyal yang dapat menggambarkan kualitas manajemen dan prospek perusahaan ke depan. Dalam hal ini, perusahaan bertindak untuk memberikan informasi yang bisa membantu pemegang saham atau investor membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk, sehingga mereka bisa mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.

Teori sinyal ini sendiri didasarkan pada konsep akuntansi pragmatik yang memfokuskan perhatian pada dampak informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi (Rokhlinsari, 2015). Salah satu pendorong utama dalam penyajian informasi akuntansi adalah adanya asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemangku kepentingan sebagai prinsipal. Asimetri informasi ini memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, yakni manipulasi akuntansi untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara menyembunyikan informasi ekonomi perusahaan yang seharusnya diketahui oleh pemangku kepentingan.

Rokhlinsari (2015) menekankan bahwa teori sinyal juga sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan investasi oleh pihak eksternal. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan menjadi kunci bagi investor untuk meyakinkan diri bahwa keputusan investasinya akan memberikan hasil sesuai harapan. Salah satu bentuk informasi yang signifikan adalah laporan keuangan perusahaan, yang berfungsi sebagai sinyal yang memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan informasi ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Dari sudut pandang teori sinyal, GCG dapat dilihat sebagai bentuk sinyal yang dikirimkan perusahaan kepada investor mengenai kualitas manajemen dan prospek masa depan perusahaan. Informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam implementasi GCG menjadi indikator bagi investor untuk menilai seberapa baik perusahaan dikelola dan apakah perusahaan memiliki potensi untuk berkembang di masa depan.

Sinyal yang dikirimkan melalui praktik GCG yang baik diharapkan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Hal ini terkait dengan *Earnings Response Coefficient* (ERC), yang mengukur reaksi pasar terhadap informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki praktik GCG yang transparan dan baik, pasar akan lebih mudah untuk menerima dan menilai informasi laba yang diberikan oleh perusahaan, karena investor percaya bahwa informasi yang disampaikan adalah valid dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, perusahaan dengan praktik GCG yang buruk akan menyebabkan informasi yang

disampaikan kurang dipercaya, sehingga reaksi pasar terhadap informasi laba tersebut mungkin lebih rendah atau bahkan negatif.

Dengan kata lain, perusahaan yang menerapkan GCG yang baik dapat memberikan sinyal yang lebih kuat kepada investor mengenai kualitas kinerja keuangan dan prospek masa depan perusahaan, yang akan tercermin dalam ERC. Semakin baik kualitas sinyal yang diberikan oleh perusahaan (melalui GCG), semakin besar respons pasar terhadap laporan laba yang diberikan. Oleh karena itu, teori sinyal menunjukkan bahwa GCG yang baik dapat meningkatkan kredibilitas informasi laba perusahaan dan, pada gilirannya, dapat mempengaruhi ERC yang lebih tinggi, karena investor merasa lebih yakin dengan keputusan investasinya.

2.2. *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal sebagai GCG adalah suatu rangkaian proses (berisi kebijakan, aturan, kebiasaan) yang bisa mempengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Menurut Pungki (2021) GCG didefinisikan sebagai struktur dan proses untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan agar mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas dengan menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan transparansi, akuntabilitas independensi dan etika dalam tata kelola perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pemasok, dan komunitas sekitar.

Surat Keputusan BUMN No. 117/2002 GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Organ yang dimaksud dalam hal ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisi dan Direksi untuk Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi untuk perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Sukardi, 2002).

Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur sistematis yang diterapkan untuk mengendalikan perusahaan supaya dapat menambah nilai dan citranya (Puspitasari et al., 2017).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* suatu kerangka kerja yang melibatkan proses, struktur, dan kebijakan untuk mengelola dan mengarahkan perusahaan. Tujuan utama GCG adalah untuk meningkatkan keberhasilan usaha, menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak, termasuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pemasok dan komunitas.

Implementasi GCG didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan etika, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks BUMN, GCG diatur melalui struktur yang melibatkan organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Pengawasan untuk memastikan

akuntabilitas serta pencapaian tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan citra perusahaan.

2.2.1. Prinsip dasar *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance diperlukan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (KNKG, 2006).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) peranan negara dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk regulator harus memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara keberlanjutan.
2. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*rules-making rules*).
3. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi.
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum secara konsisten.
5. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
6. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
7. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor (*whistleblower*) yang memberikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain.
8. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Melakukan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lainnya dalam hal negara juga sebagai pemegang saham perusahaan.

2.2.2. Peraturan yang mengatur *Good Corporate Governance*

Sebagai industri yang tergolong *Highly Regulated bank* harus menjalankan kegiatan operasionalnya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ketat. Hal ini diatur dalam Otoritas jasa Keuangan (2016) padaPJOK bernomor

55/PJOK.03/2016 terkait implementasi tata kelola bagi bank umum tercantum sebagai berikut:

1. Kebutuhan perbankan akan implementasi tata kelola yang memadai semakin meningkat seiring bertambahnya kompleksitas risiko yang dialami oleh bank.
2. Untuk peningkatan kemampuan bank dalam menyelamatkan kepentingan para pihak yang terkait, serta memperbesar loyalitas terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberlakukannya bersifat umum serta nilai-nilai kepatutan dasar pada industri perbankan, dibutuhkan implementasi pengorganisasian yang baik.
3. Terkait mempertinggi mutu implementasi pelaksanaan tata kelola merupakan termasuk suatu usaha dalam memperkuat status internal industri keuangan nasional.
4. Sehubungan implementasi tata kelola bank terdapat perubahan yang perlu di tanggapinya secara proporsional untuk memaksimalkan implementasi pengelolaan bank.

2.2.3. Asas *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*ustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Good Corporate Governance konsep penting dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen dan adil. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Asas-asas ini berfungsi sebagai fondasi dalam memastikan bahwa setiap aktivitas perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

2.2.3.1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar Transparansi adalah menekankan pentingnya penyediaan informasi yang material, akurat, dan relevan secara terbuka kepada semua pemangku kepentingan guna menjaga obyektivitas dalam pengelolaan perusahaan.

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendali internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2.2.3.2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar Akuntabilitas memastikan bahwa setiap organ perusahaan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terciptanya mekanisme pengelolaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus menyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan

semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

2.2.3.3. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Prinsip Dasar *Responsibility* mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan guna mendukung keberlanjutan usaha.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

2.2.3.4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip Dasar *Independency* perusahaan untuk dikelola secara professional tanpa campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang dapat mengganggu objektivitas pengambilan keputusan

Pengelolaan perusahaan secara professional dengan menghindari pertentangan kepentingan serta dampak tekanan dari berbagai pihak maupun yang tidak selaras dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

2.2.3.5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Dasar Kewajaran memastikan bahwa perusahaan memerlukan semua pemangku kepentingan secara adil, menghormati hak-hak mereka, dan mencegah diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya.

Keadilan dan kesetaraan didalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Dewan Komisaris Independen

Sutedi (2011) dalam bukunya menjelaskan bahwa komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan atau afiliasi dengan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan, termasuk pemegang saham pengendali, anggota Direksi, atau Dewan Komisaris lainnya. Tujuan utama dari keberadaan Komisaris Independen adalah untuk menjaga independensi dalam pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Berdasarkan buku Sutedi (2011), dewan komisaris Independen memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan GCG. Beberapa peran dan fungsi utama mereka adalah:

1. Pengawasan Independensia

Komisaris Independen memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Hal ini bertujuan agar pengelolaan perusahaan tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, tetapi juga melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Pengelolaan Risiko

Mereka turut mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam keberlanjutan perusahaan dan memberikan saran mengenai mitigasi risiko tersebut.

3. Mengawasi Konflik Kepentingan

Komisaris Independen memainkan peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik kepentingan yang mungkin muncul antara Direksi dan pemegang saham mayoritas dengan pihak lain.

4. Memberikan Nasihat dan Opini Profesional

Mereka memberikan masukan dan opini independen terkait pengambilan keputusan strategis oleh Direksi, terutama keputusan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan.

Kemudian, untuk menjaga integritas dan independensi, menurut Sutedi (2011) ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh dewan komisaris independen adalah:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga hingga derajat tertentu dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, manajerial, atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.
3. Memiliki latar belakang profesional yang memadai, seperti pengalaman di bidang keuangan, hukum, atau manajemen.

2.2.5. Dewan Direksi

Efendi (2009) menjelaskan tentang dewan direksi dalam bukunya. Menurutnya, dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai pihak yang menjalankan operasional sehari-hari, Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

Lebih lanjut, Efendi (2009) mengatakan bahwa dewan direksi memiliki peran dalam GCG sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi

Direksi bertugas merumuskan visi, misi, dan strategi perusahaan yang mencerminkan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Pengelolaan Operasional**

Direksi mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan untuk memastikan efisiensi, produktivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun peraturan eksternal.

3. **Manajemen Risiko**

Salah satu fungsi utama Direksi adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan perusahaan.

4. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka juga wajib memastikan informasi tersebut disajikan secara akurat dan transparan.

Selain peran, dewan direksi juga memiliki prinsip-prinsip pelaksanaan tugasnya. Dikutip dari Efendi (2009), setidaknya ada empat prinsip pelaksanaan tugas dewan direksi, yaitu:

1. **Transparansi**

Menjamin informasi yang relevan dan akurat dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. **Akuntabilitas**

Memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

3. **Independensi**

Bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

4. **Kewajaran**

Memberikan perlakuan yang setara kepada semua pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.2.6. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Komite ini terdiri dari anggota Dewan Komisaris, terutama Komisaris Independen, dan pihak-pihak profesional yang memiliki keahlian di bidang audit atau keuangan (Arens et al., 2017).

Menurut, Arens et al., (2017) komite audit memiliki peran dan fungsi dalam GCG, yaitu:

1. **Pengawasan Laporan Keuangan**

Komite Audit bertugas meninjau laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan untuk memastikan akurasi, relevansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

2. Audit Internal dan Eksternal

Komite Audit mengawasi pelaksanaan audit internal untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan efektif. Mereka juga bekerja sama dengan auditor eksternal dalam memeriksa laporan keuangan dan memberikan rekomendasi terkait temuan audit.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi

Komite Audit memastikan bahwa perusahaan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pasar modal.

4. Mitigasi Risiko

Mereka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait strategi mitigasi risiko berdasarkan temuan audit atau evaluasi pengendalian internal.

Dalam komite audit biasanya terdiri dari beberapa posisi, dalam bukunya (Arens et al., 2017) menyebutkan komposisi komite audit sebagai berikut:

1. Komite Audit biasanya terdiri dari:
2. Ketua: Seorang Komisaris Independen.
3. Anggota: Profesional di bidang keuangan, akuntansi, atau hukum yang memiliki kompetensi dan pengalaman relevan.

Lebih lanjut, untuk menjadi komite audit bukan tanpa syarat. Setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi komite audit, diantaranya:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali.
2. Memiliki integritas tinggi, keahlian, dan pengetahuan yang memadai di bidang akuntansi atau keuangan.
3. Mampu bekerja secara independen.

2.2.7. Pengukuran *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Didalam penelitian ini diukur dengan ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen dan komite audit. Dalam penelitian *Good Corporate Governance* ini penulis meneliti dengan dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit (Syofyan, 2021).

2.2.7.1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah bagian dari struktur perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi secara objektif tanpa keterlibatan kepentingan pribadi atau hubungan langsung dengan perusahaan. Memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada

pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak didominasi oleh kelompok lain (Boediono, 2006).

Berikut adalah rumus untuk menghitung Dewan Komisaris Independen menurut Boediono (2006).

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}}$$

Keterangan

DKI : Dewan Komisaris Independen

Dengan adanya perhitungan Dewan Komisaris Independen diatas yang digunakan untuk menghitung persentase dewan komisaris independen perusahaan terhadap total anggota dewan komisaris perusahaan, yang dimana semakin besar persentase dewan komisaris perusahaan maka diharapkan semakin terkendali dan terarah perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

2.2.7.2. Dewan Direksi

Menurut Rumapea (2017) mendefinisikan direksi pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Pengangkatan dan kepengurusan perusahaan. pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham.

Berikut adalah rumus untuk menghitung Dewan Direksi menurut Boediono (2006).

$$DD = \text{Jumlah Anggota Dewan di Perusahaan}$$

Keterangan

DD : Dewan Direksi

2.2.7.3. Komite Audit

Menurut Boediono (2006) komite audit memproses calon auditor eksternal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari luar perusahaan.

Berikut adalah rumus untuk menghitung Komite Audit menurut Boediono (2006).

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

Keterangan

KA : Komite Audit

2.3. Saham

Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan atau bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas bagian dari laba perusahaan dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan yang penting (Ramdhani & Rahayuningsih, 2023).

Pihak yang menerbitkan saham disebut investee sedang pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Sebagai salah satu bentuk ekuitas instrumen ekuitas, saham memberikan imbal balik yang merupakan hak investor berupa dividen (Indrawati, 2020).

Saham merupakan bagian dari ekuitas yang mencerminkan kepemilikan pemegang saham yang mencerminkan kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan. Saham terbagi menjadi beberapa komponen utama, antara lain modal disetor, saldo laba, dividen, saham treasuri, dan penghasilan komprehensif lain (Martani et al., 2024).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan atau bagian dari kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas bagian dari laba perusahaan berupa dividen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Saham juga merupakan bagian dari ekuitas perusahaan yang mencakup beberapa komponen utama seperti modal disetor, saldo laba, dividen, saham treasuri, dan penghasilan komprehensif lain.

2.3.1. Harga Saham

Harga saham merupakan nilai yang terbentuk di pasar modal sebagai hasil dari mekanisme permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Nilai ini mencerminkan kondisi pasar serta dinamika perdagangan saham pada suatu waktu tertentu (Nober & Puspitasari, 2020).

Menurut Jogiyanto (2017), harga saham menggambarkan nilai suatu saham di bursa yang ditentukan berdasarkan interaksi antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain, harga saham bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan. Pemegang saham pun memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen serta capital gain dari pergerakan harga saham tersebut.

Agus (2011) menambahkan bahwa harga saham terbentuk melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar modal. Jika permintaan terhadap suatu saham lebih tinggi dibandingkan penawarannya, maka harga saham akan cenderung meningkat, sebaliknya jika penawaran lebih besar, harga saham dapat mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham selalu bergerak dinamis mengikuti perubahan kondisi pasar serta keputusan investasi para pelaku pasar.

2.3.2. *Return Saham*

Dalam dunia investasi, *return* saham atau tingkat pengembalian merupakan indikator penting bagi para pemegang saham untuk menilai keuntungan dari investasi mereka. Secara umum, *return* ini menggambarkan pendapatan yang diterima investor sebagai hasil dari investasi di suatu perusahaan (Ang, 1997).

Menurut Hartono (2010), *return* saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu *realized return* (tingkat pengembalian realisasi) dan *expected return* (tingkat pengembalian ekspektasi). *Realized return* mengacu pada tingkat pengembalian yang dihitung berdasarkan data historis, yang berarti sudah terjadi di masa lalu. *Return* ini sering digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan serta dasar dalam memperkirakan *expected return* dan tingkat risiko. Sebaliknya, *expected return* adalah tingkat pengembalian yang diharapkan akan terjadi dimasa depan, namun masih bersifat tidak pasti karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan pasar.

2.3.3. *Abnormal Return (AR)*

Dalam dunia investasi, *abnormal return* (AR) digunakan untuk mengukur apakah ada perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan investor dan imbal hasil yang benar-benar terjadi di pasar. Menurut Hartono (2010), AR merupakan selisih antara *actual return* (imbal hasil sesungguhnya) dan *expected return* (imbal hasil ekspektasi). Imbal hasil ekspektasi sendiri mencerminkan keuntungan yang diharapkan oleh investor di masa depan, sedangkan imbal hasil sesungguhnya adalah keuntungan yang benar-benar mereka peroleh dari investasinya.

Hartono (2017) menjelaskan dalam bukunya bahwa AR bisa muncul akibat dari berbagai peristiwa tertentu, seperti hari libur nasional, *stock split*, kondisi politik yang tidak stabil, kejadian luar biasa, serta penawaran perdana saham. Oleh karena itu, AR sering digunakan sebagai indikator untuk melihat apakah pasar saham bereaksi terhadap suatu peristiwa ekonomi atau politik yang sedang berlangsung.

2.4. *Earnings Response Coefficient*

Earnings Response Coefficient (ERC) adalah ukuran jumlah abnormal *return* dalam saham sebagai respons terhadap komponen-komponen abnormal *income* (pendapatan tak terduga) yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham. Kualitas impor dapat diwakili oleh kemampuan informasi impor untuk merespons pasar. Dengan kata lain, pendapatan yang dilaporkan memiliki kekuatan reaksi (kekuatan respons). Respons pasar yang kuat terhadap informasi kinerja tercermin dalam koefisien Laba yang tinggi, yang menunjukkan bahwa kualitas pendapatan baik (Akbar, 2020).

Menurut (Paramita & Hidayanti, 2013) menggunakan *Earnings Response Coefficient* (ERC) sebagai alternatif untuk mengukur *value relevance* informasi laba. Rendahnya ERC menunjukkan bahwa laba kurang informatif bagi investor untuk membuat keputusan ekonomi.

Earnings Response Coefficient (ERC) adalah kepekaan return saham terhadap setiap rupiah laba atau laba kejutan (*unexpected Earnings*). Laba kejutan mempresentasikan informasi yang belum tertangkap oleh pasar sehingga pasar akan bereaksi pada saat pengumuman laba (Kurnia et al., 2019).

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa *Earnings Response Coefficient* merupakan ukuran yang mencerminkan tingkat respons pasar terhadap informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. ERC mengukur kepekaan return saham terhadap laba tak terduga (*unexpected Earnings*) yang mencerminkan informasi baru bagi pasar. ERC mencerminkan kualitas laba, dimana koefisien ERC yang tinggi menunjukkan reaksi pasar yang kuat terhadap informasi laba, menandakan bahwa kualitas laba perusahaan dianggap baik. Sebaliknya, ERC yang rendah mengindikasikan bahwa laba kurang relevan bagi investor dalam pengambilan keputusan ekonomi.

ERC dapat dihitung menggunakan dua proksi. Proksi pertama adalah menghitung *Cummulative Abnormal Return* (CAR) untuk setiap sampel. CAR digunakan untuk menghitung dari sisi saham perusahaan. Namun, untuk mengukur CAR harus melalui dua tahapan terlebih dahulu, yaitu *Calculate individual and market return* dan *Abnormal Return* (AR). Kemudian proksi kedua adalah menghitung *Unexpected Earnings* (UE) untuk setiap sampel. UE digunakan untuk menghitung dari sisi laba perusahaan. Setelah nilai CAR dan UE didapatkan, selanjutnya diperlukan nilai konstanta yang bisa didapatkan melalui perhitungan statistik menggunakan SPSS. Barulah setelahnya bisa menghitung nilai ERC.

2.4.1. Pengukuran *Commulative Abnormal Return* (CAR)

CAR digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu peristiwa terhadap nilai saham. Perhitungan CAR dilakukan dengan menjumlahkan *abnormal return* (AR) selama waktu yang ditentukan, baik sebelum maupun sesudah. Namun, untuk mengukur CAR setidaknya harus melewati dua tahapan terlebih dahulu, yaitu *Calculate individual and market return* dan *Abnormal Return* (AR). Hal ini karena dalam perhitungan CAR terdapat nilai AR yang perlu diketahui lebih dahulu nilainya, dan untuk menghitung AR perlu untuk mengetahui nilai *Calculate individual and market return* Terlebih dahulu. Itulah sebabnya perhitungan CAR harus melalui dua tahapan sebelum akhirnya bisa menghitung nilai CAR. Berikut adalah tahapan rumus untuk menghitung CAR menurut (Paramita & Hidayanti, 2013). Berikut perhitungan CAR:

- a. *Calculate individual and market return*

$$R_{it} = \frac{(P_{it} - (P_{it-1} - 1))}{P_{it-1} - 1}$$

$$R_{mt} = \frac{(IHS_{Gt} - (IHS_{Gt-1} - 1))}{IHS_{Gt-1} - 1}$$

Keterangan

Rit	: Return saham perusahaan (i) pada periode (t)
Pit	: Harga saham perusahaan (i) pada hari (t)
Pit-1	: Harga saham perusahaan (i) pada hari (t-1)
Rmt	: Return pasar pada hari ke (t)
IHSGt	: IHSG pada hari ke (t)
IHSGt-1	: IHSG pada hari ke (t-1)

b. *Abnormal Return (AR)*

$$AR_{it} = Rit - Rmt$$

Keterangan

ARit	: Abnormal return perusahaan (i) pada periode (t)
Rit	: Return saham perusahaan (i) pada periode (t)
Rmt	: Return pasar pada hari ke (t)

c. *Cummulative Abnormal Return (CAR)*

$$CAR_i(t-5, t+5) = \sum_{t-5}^{t+5} AR_{it}$$

Keterangan

CAR _i (t-5,t+5)	: Cummulative abnormal return perusahaan I pada hari ke t-5 hingga t+5
----------------------------	--

2.4.2. Pengukuran *Unexpected Earnings* (UE)

Setelah menghitung CAR, selanjutnya masuk tahapan kedua yaitu menghitung UE. UE digunakan untuk mengukur perbedaan antara laba yang dilaporkan oleh perusahaan dengan perkiraan pasar. UE menggambarkan selisih antara laba yang diumumkan dengan estimasi laba yang diharapkan sebelumnya, yang biasanya dihitung berdasarkan konsensus analis atau proyeksi yang ada. Jika laba yang dilaporkan lebih besar dari perkiraan, UE akan bernilai positif, sementara jika laba yang dilaporkan lebih rendah dari perkiraan, UE akan bernilai negatif (Pradita & Sunarsih, 2023). Berikut perhitungan UE:

$$UE_{it} = \frac{(EPS_{it} - (EPS_{it-1} - 1))}{EPS_{it-1} - 1}$$

Keterangan

UE _{it}	: Unexpected Earnings perusahaan I pada tahun t
EPS _{it}	: Laba per saham perusahaan I pada tahun t

EPS_{it-1} : Laba per saham perusahaan I pada tahun t-1

2.4.3. Perhitungan ERC

Setelah nilai CAR dan UE didapatkan, barulah bisa dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai ERC dengan rumus:

$$CAR_i(t-5, t+5) = \alpha + \beta UE_{it} + \varepsilon$$

Keterangan

α : Konstanta

βUE_{it} : Koefisien nilai UE perusahaan I pada tahun t

ε : Error terms

2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan dengan beracuan pada penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya akan disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Melanthon Rumapea (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015	Variabel Independen: - Good Corporate Governance Variabel dependen: - Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur dimana GCG yang terdiri dari dewan direksi signifikan dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dewan komisaris signifikan dan berpengaruh positif
2	Genoveva Yeti (2020)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate	Variabel Independen: Corporate Social Responsibility	Hasil penelitian ini menunjukkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC, informasi CSR kurang dipercaya oleh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
		Governance, Ukuran Perusahaan, Kesempatan Bertumbuh dan Profitabilitas Terhadap Earnings Response Coefficient	• Corporate Governance • Ukuran Perusahaan • Kesempatan Bertumbuh • Profitabilitas Variabel Independen: • Earnings Response Coefficient	investor untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ERC, pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERC berpengaruh negative terhadap ERC, Informasi non akuntansi perusahaan besar digunakan lebih dominan daripada laporan keuangan. Pengaruh kesempatan bertumbuh terhadap ERC tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC, Pengaruh Profitabilitas terhadap ERC berpengaruh positif terhadap ERC. Profitabilitas tinggi menarik investor, meningkatkan respons terhadap laba.
3	Putri & Fitriyanti (2017)	Pengaruh Persistensi Laba, Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap kualitas laba	Variabel Independen: • Persentase Laba • Good Corporate Governance (GCG) • Kualitas Audit	Persistensi Laba berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa laba yang persisten belum tentu kualitas tinggi karena bisa dipengaruhi oleh komponen transitori.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
			Variabel Dependen: Kualitas Laba	Komisaris Independen berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kualitas laba. Investor cenderung tidak mempertimbangkan proporsi komisaris independen dalam keputusan investasi mereka. Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini diduga karena pembentukan komite audit lebih banyak untuk memenuhi regulasi dibandingkan meningkatkan efektivitas pengawasan. Kualitas audit tidak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laba. Ketidak signifikan ini dapat disebabkan oleh lebih banyaknya perusahaan sampel yang di audit oleh KAP non-Big Four
4	Mario Bernado (2023)	Pengaruh Earnings Response Coefficient (ERC) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas sebagai	Variabel Independen: Earnings Response Coefficient (ERC) Variabel Moderasi:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidak signifikan model regresi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan sektor makanan di Indonesia perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
		Variabel Moderating	- Profitabilitas Variabel Dependen; - Nilai perusahaan.	berpotensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan mereka menjadi landasan bagi perusahaan sektor makanan untuk mempertimbangkan strategi bisnis yang lebih komprehensif dan memahami dampak berbagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan mereka di pasar modal.
5	Desi Adhariyani (2020)	Tingkat Keluasan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Dan Hubungannya Dengan Current Earnings Response Coefficient	Variabel Independen: - Tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan Variabel Dependen: - Current Earnings Response Coefficient	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan berhubungan positif dengan ERC
6	Amelia Ardhya Garini & Lubis (2023)	Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di BSI KCP Jakarta	Variabel Independen: - Good Corporate Governance Variabel Dependen: - Efektivitas	Hasil penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah kantor cabang yang berpengaruh kepada efektivitas sehingga perusahaan meminimalisir terjadinya fraud.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
7	Nidya Kusumaningtyas (2023)	Pengaruh kebijakan Hutang dan Kebijakan Investasi Terhadap Kinerja Keuangan Yang Dimoderasi Dari Good Corporate Governance	Variabel Independen: - Good Corporate Governance Variabel Dependen: - Kebijakan Hutang (Leverage) - Kebijakan Investasi	Hasil penelitian pengaruh kebijakan hutang terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi dari Good Corporate Governance
8	Tyas Dwi Cahyono (2024)	Pengaruh Good Corporate Governance yang baik dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Properti & Real Estate	Variabel Independen: - Good Corporate Governance (GCG) Variabel Dependen: - Corporate Social Responsibility (CSR)	Hasil penelitian Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility memiliki berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. GCG yang baik meningkatkan kepercayaan investor, sedangkan CSR memperkuat reputasi perusahaan, keduanya berkontribusi pada peningkatan nilai pasar perusahaan.
9	Tiopan Naek & Lauw Tjun Tjun (2020)	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan	Variabel Independen: - Good Corporate Governance Variabel Dependen: - Corporate Social Responsibility - Kinerja	Hasil penelitian CSR memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, baik dalam peningkatan reputasi, kepercayaan, pemangku kepentingan, maupun daya saing pasar. GCG sering memperkuat hubungan antar CSR dan kinerja perusahaan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
		Manufaktur di BEI Periode 2015-2017		
10	Intan Kurnia, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2020)	Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017	Variabel Independen: • Good Corporate Governance • Corporate (GCG) • Social Responsibility (CSR) Variabel Dependen: • Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian CSR memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. GCG penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik memperkuat hubungan antara CSR dan Kinerja Keuangan dan Ukuran perusahaan menjadi signifikan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan CSR dan GCG secara efektif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan beberapa perbedaan utama yang membedakannya dari studi terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada periode penelitian, lokasi penelitian, serta variabel independen yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, periode yang dikaji mencakup tahun 2019-2023 dengan fokus pada sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan memilih periode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Earnings Response Coefficient, mengingat dinamika industri perbankan yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun regulasi.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan, penelitian ini tetap memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, terutama dalam penggunaan beberapa variabel independen dan dependen yang memiliki karakteristik serupa. Variabel seperti dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit tetap menjadi faktor utama dalam menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap respons pasar terhadap laba perusahaan. Konsistensi dalam penggunaan variabel ini memungkinkan penelitian untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan dapat berkontribusi terhadap

transparansi dan kredibilitas informasi keuangan dalam industri perbankan di Indonesia.

Tabel 2. 2
Matriks Penelitian Sebelumnya

No	Komponen <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Earnings Response Coefficient</i>	
		Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1	Komisaris Independen	Putri & Fitriasari (2017)	Yeti Genoveva (2020)
		Kusumaningtyas Nidya (2023)	
		Cahyono Tyas Dwi (2024)	
		Naek & Tjun (2020)	
		Kurnia et al (2019)	
2	Dewan Direksi	Rumapea Melanthon (2017)	Kurnia et al (2019)
		Garini & Lubis (2023)	
		Kurnia et al (2019)	
3	Komite Audit	Garini & Lubis (2023)	Putri & Fitriasari (2017)
		Kusumaningtyas Nidya (2023)	
		Naek & Tjun (2020)	
		Kurnia et al (2019)	

2.5.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami hubungan antara GCG dengan ERC. GCG merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam penelitian ini, GCG di proksikan dengan Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Pemilihan proksi GCG didasarkan oleh peran penting dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan perusahaan.

Hubungan GCG dengan ERC ini didasari pada asumsi bahwa pengelolaan perusahaan yang baik akan menciptakan kepercayaan di pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan respons pasar. Hubungan itu juga akan dijelaskan melalui masing-masing proksi GCG terhadap ERC berikut:

2.5.2.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap ERC

Dewan komisaris independen memiliki peran sentral dalam memastikan pengawasan yang objektif dan transparan terhadap pengelolaan perusahaan. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, keberadaan komisaris independen dirancang untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Komisaris independen diharapkan mampu memberikan pandangan yang

tidak bias dalam pengambilan keputusan strategis dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeti (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap ERC. Hal ini dikarenakan komisaris independen meningkatkan kualitas pengawasan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan relevan bagi investor. Informasi laba yang lebih kredibel memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Respons pasar terhadap informasi laba tersebut mencerminkan kepercayaan yang meningkat terhadap integritas laporan keuangan perusahaan, sehingga menghasilkan *Earnings Response Coefficient* yang lebih tinggi.

Selain itu, penelitian oleh Adhariani (2005) mendukung pandangan ini dengan menyebutkan bahwa tingkat transparansi laporan keuangan berhubungan positif dengan ERC. Dewan komisaris independen memainkan peran utama dalam memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi secara menyeluruh dan tepat waktu, untuk menjaga kepercayaan investor. Transparansi ini membantu pasar merespons informasi laba dengan lebih akurat, menghasilkan *abnormal return* signifikan.

Secara keseluruhan, adanya dewan komisaris independen yang kompeten dan independen memperkuat mekanisme pengawasan perusahaan. Dengan pengawasan lebih baik, risiko manipulasi laporan keuangan berkurang, sehingga kualitas informasi laba meningkat.

2.5.2.2. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap ERC

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan operasional dan strategis perusahaan. Direksi memiliki peran krusial dalam menyusun strategi bisnis yang berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan serta memastikan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan direksi dalam menjalankan tugasnya akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap informasi laba yang disajikan.

Penelitian oleh Garini (2023) menemukan bahwa dewan direksi yang kompeten dapat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa informasi laba yang diumumkan relevan dan dapat dipercaya.

Penelitian Bernado (2023) bahwa kinerja laba yang baik adalah salah satu faktor memperkuat ERC. Direksi yang menghasilkan laba berkualitas tinggi melalui strategi bisnis yang efektif memberikan sinyal yang positif kepada pasar. Dewan direksi tidak hanya bertanggungjawab atas operasional perusahaan tetapi juga mempengaruhi persepsi investor terhadap laporan keuangan.

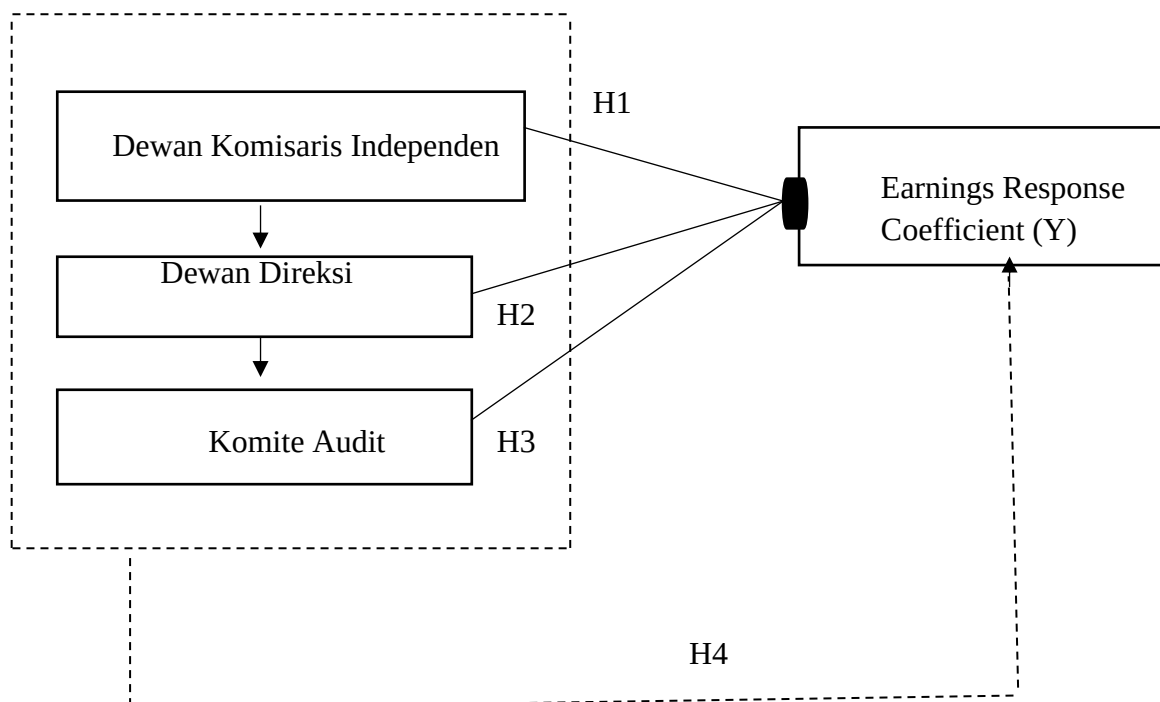
2.5.2.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap ERC

Komite audit adalah bagian penting dari struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi memastikan integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Komite audit biasanya terdiri dari anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, diketuai oleh komisaris independen untuk memastikan objektivitas dalam pengawasan.

Penelitian Rumapea (2017) keberadaan komite audit yang efektif berdampak positif pada profitabilitas perusahaan, yang selanjutnya berpengaruh pada ERC. Karena komite audit bertanggungjawab untuk memeriksa sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material maupun manipulasi.

Penelitian oleh Yeti (2021) menunjukkan bahwa komite audit yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Investor yang percaya pada keandalan laporan keuangan perusahaan akan lebih responsive terhadap informasi laba, yang meningkatkan ERC.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis Penelitian

Menurut Hardani et al. (2020) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap ERC
- H2 : Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap ERC
- H3 : Komite Audit memiliki pengaruh terhadap ERC
- H4 : Penerapan prinsip-prinsip GCG Berpengaruh terhadap ERC